

TAJUK RENCANA

UHC Award 2024 untuk DIY

PEMDA Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dalam hal ini Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, menerima *Universal Health Coverage* (UHC) Award 2024. Penghargaan diserahkan oleh Wakil Presiden (Wapres) RI KH Ma'ruf Amin, Kamis (8/8) di Jakarta. Diharapkan, capaian kepesertaan BPJS Kesehatan hingga 100 persen tidak hanya di DIY tetapi juga semua daerah di Indonesia.

Menurut Wapres, Penghargaan dari BPJS Kesehatan untuk Gubernur DIY ini berkaitan keberhasilan DIY dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) minimal 95 persen dari total penduduk. Dari target 95 persen, ternyata bisa mencapai 100 persen dan menjadi satu-satunya daerah yang mampu mencapainya, dari 33 provinsi dan 452 kabupaten/kota penerima UHC Award 2024 ini.

Secara nasional, penghargaan UHC tahun 2024 ini menandai pencapaian Indonesia dalam menyediakan jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi warganya melalui Program JKN-KIS yang telah berjalan selama 10 tahun ini. Diharapkan, UHC Award dapat memacu pemerintah daerah untuk menyempurnakan cakupan kepesertaan aktif dan memastikan perlindungan kesehatan penduduk secara menyeluruh di wilayah masing-masing.

Terkait penghargaan tersebut, tentunya sangat layak disampaikan apresiasi tinggi kepada Gubernur DIY yang telah menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi dalam mewujudkan program UHC. Selanjutnya, program UHC JKN-KIS perlu terus didukung oleh berbagai pihak dan masyarakat.

Setelah menerima penghar-

gan tersebut, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, penghargaan itu menjadi motivasi, tidak hanya dari pemerintah daerah tapi juga masyarakat. Gubernur DIY juga berharap semua daerah di Indonesia bisa mencapai kepesertaan JKN-KIS hingga 100 persen.

Ditegaskan pula, semua pihak memiliki kewajiban agar masyarakat di daerah difasilitasi untuk ikut dalam jaminan kesehatan. Rakyat harus difasilitasi oleh pimpinan daerah untuk bisa hidup lebih sejahtera dan sehat.

Di sisi lain, Sri Sultan juga berharap agar BPJS Kesehatan ada peningkatan kualitas pelayanan. Tidak hanya di rumah sakit, tetapi di semua layanan BPJS Kesehatan. Pelayanan harus semakin baik, makin mudah, dan jelas bagi masyarakat.

Sehubungan dengan harapan Gubernur DIY tersebut, ada nilai plus yang perlu mendapat perhatian khusus, yakni BPJS harus memperhatikan aspek kultur masyarakat yang berbeda-beda. Juga dengan pola pendekatan dan pola komunikasi yang berbeda.

Konsep fasilitasi dan layanan BPJS Kesehatan yang disampaikan Sri Sultan Hamengku Buwono X tentu akan menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap JKN-KIS. Dengan demikian, dapat dipastikan kepesertaan UHC akan terus meningkat, sebagaimana disampaikan Wapres Ma'ruf Amin. Bahwa UHC merupakan konsep pembangunan kesehatan global yang memastikan setiap individu memiliki akses pelayanan kesehatan, dengan aspek yang adil, komprehensif, dan berkualitas.

Semoga harapan Wapres RI dan konsep yang disampaikan Gubernur DIY terkait JKN-KIS benar-benar mampu meningkatkan nilai manfaat UHC. □-d

Nasionalisme dalam Perayaan Kemerdekaan

Paulus Mujiran

RASA nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia seperti digugah kembali. Memasuki bulan Agustus penjual properti peringatan kemerdekaan sudah ramai di jalan-jalan protokol. Nuansa perayaan kemerdekaan terasa di beberapa tempat. Selain pernak-pernik perlengkapan peringatan kemerdekaan, persiapan aneka macam lomba, penggalan dana pun semarak dilakukan.

Biasanya, mereka yang berdagang perlengkapan perayaan kemerdekaan ketuban rezeki. Mereka menjual bendera merah putih dalam berbagai jenis dan ukuran, umbul-umbul dan pernak-pernik berwarna merah putih. Tak ketinggalan penjual tongkat bambu juga memanen rezeki untuk memasang umbul-umbul dan bendera. Perayaan kemerdekaan menggugah banyak orang untuk berpartisipasi dan terlibat dalam aneka ragam. Anak-anak, remaja dan orang dewasa semua berupaya melibatkan diri dalam beragam bentuknya.

Dari tahun ke tahun gegap gempita warga dalam merayakan kemerdekaan ini tentu sangat membanggakan. Sebagai perayaan hanya peringatan kemerdekaan yang mampu menjembatani sekat-sekat perbedaan yang ada di masyarakat. Kaya miskin, pejabat tinggi dan rakyat biasa bisa duduk lesehan melakukan malam tirakatan kemerdekaan. Kalau hari besar agama hanya milik kalangan penganutnya, hari kemerdekaan milik semua warga negara tanpa kecuali.

Bahkan sekat agama yang seringkali membangun jarak nyaris luluh. Hanya di hari kemerdekaan semua orang dapat terlibat. Perayaan kemerdekaan mampu diterima semua kalangan tanpa kecuali. Di aras permukaan perayaan kemerdekaan mampu menggerakkan semua elemen masyarakat untuk terlibat. Ini semua tidak lepas dari rasa syukur kita boleh menjadi bangsa yang merdeka.

Meski begitu konsepsi kemerdekaan kerap disederhanakan hanya sekadar ekspresionisme sehingga lebih mementingkan aksi komunal dalam membuat sebuah perayaan. Seolah-olah nasionalisme hanya terjadi di bulan Agustus setelahnya tidak

ada lagi. Partisipasi warga lebih menjadi ukuran dalam merayakan kemerdekaan. Kemerdekaan dengan begitu, belum dapat dirasakan oleh semua warga bangsa. Dengan demikian kita belum merdeka dalam arti yang sesungguhnya.

Terlalu berlebihan karena perayaan kemerdekaan sering malah diterjemahkan sebagai bagian dari mengisi kemerdekaan. Partisipasi da-

lamin lomba dan kedatangan dalam aneka kegiatan dipandang sebagai aksi mengisi kemerdekaan. Karena itu tidak ada cara lain dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan dengan muka baru. Perlu dipikirkan cara-cara yang berbeda untuk memperingati kemerdekaan ini. Partisipasi warga tetap penting namun bukan yang utama.

Teuku Jacob (2001) kemerdekaan hendaknya ditempatkan untuk menciptakan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan membangun bangsa yang percaya diri dan berani membangun di atas kaki sendiri. Kita mempunyai beragam kekayaan budaya yang dapat memperkaya hidup berbangsa dan sangat bermanfaat dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Dengan begitu perayaan kemerdekaan sejatinya bisa dilakukan untuk mendidik warga

makin mencintai negeri sendiri. Ruang kesadaran itu yang kini kian dimaknai secara sangat terbatas. Kemerdekaan adalah soal kebebasan batin bukan ekspresi simbol harafiah. Kembalikan esensi kemerdekaan pada kemerdekaan lahir dan batin yang mensejahterakan rakyat. Esensi kemerdekaan adalah pembebasan terhadap nilai-nilai yang membelenggu. Untuk itu dalam konteks kekinian harus ada model baru menggelorakan semangat kemerdekaan sesuai konteks yang nyata dan aktual. Tidaklah lebih penting dalam malam renungan kemerdekaan, warga diajak untuk merefleksikan kehidupan kampungnya, soal kerukunan dalam hidup bersama, soal anak-anak sekitar yang putus sekolah. Kemerdekaan juga mendorong warga mengerti dan memahami persoalan-persoalan dalam konteks lokal yang ada di sekitar mereka. Karena itu aksi-aksi kemerdekaan juga diarahkan untuk aktivitas yang mendukung kesejahteraan warga.

Ritual simbolik sebagai perlambang tetap penting. Aksi-aksi yang melibatkan warga juga penting. Justru kekuatan bangsa ini kalau mampu mengumandangkan nilai-nilai kemerdekaan secara mendasar. Kesadaran bahwa kemerdekaan ini direbut dari penjajah dengan cucuran darah dan air mata tetap penting. Indonesia masa depan adalah Indonesia yang dibangun dengan kesungguhan seluruh warganya untuk terus berjuang mengisi kemerdekaan. □-d



KR-JOKO SANTOSO

*\* Paulus Mujiran, Ketua Pelaksana Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata di Semarang.*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 550 - 600 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)  
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.  
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.  
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,  
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.  
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).  
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) Penasihat: Drs HM Idham Samawi. Komisaris Utama: Prof Dr Inajati Adrisijanti. Direktur Utama: M Wirmon Samawi SE MIB. Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. Direktur Keuangan: Imam Satriadi SH.  
Direktur Umum: Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc.  
Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. General Manager : H Yoeke Indra Agung Laksana, SE. Pemimpin Redaksi/Penganggung Jawab: Dr Drs H Octo Lampito MPd. Wakil Pemimpin Redaksi: Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. Redaktur Pelaksana: Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. Manajer Produksi Redaksi: Ngabdul Wakid. Redaktur: Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Hariyadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. Fotografer: Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. Grafis : Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. Sekretaris Redaksi: Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. Kepala TU Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)  
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)  
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. Alamat e-mail: naskahkr@gmail.com. Radio : KR Radio 107.2 FM.  
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:  
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Arsul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -  
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

Kebaruan BTU Pendidikan Pancasila

Ali Usman

PERATURAN Mendikbudristek No. 12 tahun 2024 menandai diterapkannya Kurikulum Merdeka secara menyeluruh untuk semua satuan pendidikan di Indonesia, mulai tingkat PAUD, Pendidikan Dasar, hingga Pendidikan Menengah. Peraturan ini menjadi acuan, kerangka, dan struktur berpikir dalam menerapkan kurikulum yang secara bertahap telah diterapkan sejak tahun 2022 ini.

Upaya mendukung program tersebut, dalam empat tahun terakhir, ada banyak instrumen yang dituntut untuk menyesuaikan, dan ada pula yang dipersiapkan dari awal. Di antara instrumen itu dapat diamati pada media pembelajaran buku teks utama (BTU), yang untuk sekadar menyebut contoh, melalui pembelajaran Pancasila yang tampak sedikit baru atau beda dibanding sebelumnya.

Kebaruan itu secara umum menyangkut minimal dua hal. Pertama, untuk yang ke sekian kalinya, nama matapelajaran diganti, dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) menjadi Pendidikan Pancasila berdasarkan Keputusan Mendikbudristek Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum.

Kedua, penulisan BTU Pendidikan Pancasila untuk sekolah dasar hingga menengah atas, hasil kerja sama dua lembaga negara, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI. Kedua lembaga ini memiliki komitmen yang sama, yaitu menghadirkan BTU Pendidikan Pancasila yang komposisinya 30 persen materi dan 70 persen aktivitas.

Kebaruan Materi

Lalu, adakah yang lebih spesifik menunjukkan kebaruan dari BTU Pendidikan Pancasila? Ada. Yaitu pada aspek materi atau kontennya. Yang terlihat kuat dan terasa ada pada pelacakan sumber data otentik berdasarkan keterangan dari tokoh-tokoh yang terlibat langsung di sekitar sejarah perumusan Pancasila dan penerapannya sebagai ideologi bangsa. Pertama, klarifikasi istilah yang me-

nunjuk pada badan perumus Pancasila atau lazim ditulis BPUPKI. Dalam BTU Pendidikan Pancasila, huruf 'i' dihilangkan. Yang benar adalah BPUPK (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan). Mengapa demikian? Karena pada masa itu, belum menjadi bangsa merdeka, sehingga belum ada kesepakatan nama negara. Dan juga, dalam Bahasa Jepang, yang dikenal dengan nama *Dokuritu Zyunbi Tyoosakai*, tidak menyebutkan nama negara.

Kedua, peneguhan hari lahir Pancasila, yang mengacu pada pidato Soekarno di hadapan anggota sidang BPUPK, tanggal 1 Juni 1945. Hal ini mengacu pada fakta sejarah yang menyebutkan bahwa hanya Soekarnolah yang menjawab secara eksplisit pertanyaan ketua sidang BPUPK, Radjiman Wedioningrat, "Apa yang akan menjadi dasar negara baru (yang di kemudian hari bernama Indonesia) itu?" Soekarno sebagaimana dalam isi pidatonya, mengajukan nama Pancasila.

Karena alasan itulah, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keppres Nomor 24 Tahun 2016 dengan menetapkan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila, dan terus diperingati hingga sekarang. Melalui Keppres itu juga, telah imbungk kami pendapat-pendapat minor terkait hari lahir Pancasila yang mengacu pada 22 Juni 1945 (lahirnya Piagam Jakarta) atau 18 Agustus 1945 (pegasan Pancasila sebagai dasar negara oleh sidang PPKI).

Ketiga, penjelasan tentang Pancasila sebagai meja statis dan *leitstar* dinamis. Ini juga termasuk hal baru yang dimasukkan ke dalam materi BTU Pendidikan Pancasila. Apa maksudnya? Istilah meja statis dan *leitstar* dinamis sebenarnya bersumber dari

pandangan Soekarno. Maksud dari meja statis adalah Pancasila merupakan persatuan bangsa. Pancasila dapat mempersatukan dan mempertemukan ragam perbedaan di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Sementara sebagai *leitstar* dinamis, berarti menjadikan Pancasila sebagai sumber nilai dalam menggerakkan dan menghadapi tantangan zaman, baik dalam konteks bermasyarakat maupun bernegara. Pancasila sebagai *leitstar* dinamis dalam istilah Soekarno disebut ibintang penuntuni. Argumen ini, di kemudian hari, oleh Orde Baru dan para pengkaji Pancasila kala itu, disebut sebagai ideologi tertutup dan ideologi terbuka.

Sampai di sini, dapatlah dikatakan, bahwa penulisan BTU Pendidikan Pancasila kali ini, untuk materi atau kontennya, terlihat peran dan kontribusi BPIP yang tampak menyal, dengan merujuk pada sumber-sumber data otentik. Sementara Kemendikbudristek fokus pada pengembangan pedagoginya, sehingga membuat buku ajar lebih hidup dan dialogis dengan pembaca (siswi/a). □-d

*\* Ali Usman, Dosen dan Peneliti Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara (PSPBN) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

Pojok KR

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menerima UHC Award 2024.  
-- DIY memang istimewa.  
\*\*\*  
Setelah diburu 3 tahun, DPO penipuan haji khusus ditangkap Tim Kejati DIY.  
-- Jangan hanya ditangkap!  
\*\*\*  
Dinamika Pilkada 2024 di berbagai daerah mulai terasa makin intens.  
-- Tetap harus kondusif.

Berabe